



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI DENGAN
MENTERI PERINDUSTRIAN RI**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : III
Rapat ke- :
- Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 14 Februari 2023
Waktu : Pukul 13.47 s.d. 15.55 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI,
Gedung Nusantara 1, Jakarta Pusat
- Ketua Rapat : Dony Maryadi Oekon, S.T (F- PDIP/Wakil Ketua
Komisi VII DPR RI).
- Sekretaris Rapat : Dra. Nanik Herry Murti/
Kabag. Set. Komisi VII DPR RI
- Acara : 1. Evaluasi kinerja T.A 2022
2. Program prioritas T.A 2023
3. Progres dan Rencana Hilirisasi Mineral
4. Lain – lain.
- Hadir : 21 orang Anggota hadir dari 52 orang Anggota
Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN :

1. Sugeng Suparwoto/F-Nasdem/Ketua Komisi VII DPR RI
2. Dony Maryadi Oekon/F-PDIP/Wakil Ketua KOomisi VII DPR RI
3. Maman Abdurrahman, S.T./F-Golkar/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
4. Bambang Haryadi, S.E./F-Gerindra/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

5. H. Eddy Soeparno, S.H, M.H./F-PAN/Wakil Ketua
Komisi VII DPR RI

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

1 orang anggota dari 10 anggota:

1. Ribka Tjiptaning Ploretariyati

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

3 orang anggota dari 7 anggota:

1. Drs. H. M. Gandung Pardiman, M.M.

2. Ir. Lamhot Sinaga

3. Bambang Patijaya, S.E., M.M.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

1 orang anggota dari 6 anggota:

1. Dr. Ramson Siagian

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

2 orang anggota dari 4 anggota:

1. Arkanata Akram, S.T., B.E. (Hons) M.Eng.Sc.

2. Rico Sia

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. H. Marwan Ja'far

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

5 orang anggota dari 5 anggota:

1. Sartono Hutomo

2. Muhammad Nasir

3. Zulfikar Hamonangan, S.H.

4. Rusda Mahmud

5. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M.I.Pol.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 orang anggota dari 4 anggota:

1. Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc.

2. H. Nasril Bahar, S.E.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang anggota dari 1 anggota:

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si. (Menteri
Perindustrian RI)

2. Dody Widodo (Sekjen Kementerian Perindustrian RI)

JALANNYA RAPAT:

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII DPR RI, hadir di sini Bapak Maman Abdurrahman dan

Yang kami hormati Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI,

Yang kami hormati Pak Menteri Perindustrian Republik Indonesia beserta jajaran, serta

Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat kerja guna melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas perhatian, serta kesediaan Bapak dan Ibu Anggota Komisi VII DPR RI, Menteri Perindustrian Republik Indonesia beserta jajarannya untuk mengikuti rapat kerja pada hari ini.

Sesuai undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023, pada hari ini Komisi VII DPR RI akan melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, dengan agenda:

1. Evaluasi kinerja tahun anggaran 2022
2. Program prioritas tahun anggaran 2023
3. Progres dan Rencana Hilirisasi Mineral
4. Lain - lain

Berdasarkan data dari sekretariat, Anggota Komisi VII DPR RI yang telah hadir berjumlah 15 anggota dari 52 Anggota Komisi VII, yang terdiri atas 7 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 281 ayat (1) telah terpenuhi dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup.

Oleh karena ini Pimpinan meminta persetujuan Anggota agar rapat kerja ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dan bersifat terbuka.



Apakah dapat disetujui? Atas persetujuan anggota dan dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.47 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Sebelum melanjutkan rapat ini kami minta persetujuan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI bahwa rapat ini selesai pada pukul 15.00 WIB, mudah-mudahan pengennya *sih* lebih cepat *sih* biar *nggak* kelamaan. Setelah rapat dimulai dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama. Apakah dapat disetujui?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Bapak-Ibu yang saya hormati.

Tahun 2023 merupakan tahun yang penuh tantangan untuk pemulihan ekonomi nasional di tengah ancaman-ancaman global dari sisi ekonomi, pangan dan energi yang masih menghantui rakyat dapat terlindungi dan momentum pemulihan terus berjalan.

APBN tahun anggaran 2022 dan 2023 adalah instrumen yang dapat diandalkan dalam mendukung hal tersebut. Dengan dukungan APBN yang kuat dan efektif tahun 2022 dan tahun 2023 ini berbagai langkah dan strategi pemerintah termasuk dukungan stimulus bagi masyarakat terdampak telah menjadikan Indonesia diakui dunia sebagai negara yang berhasil menangani dampak pandemi Covid-19 dengan sangat baik.

Oleh karena itu Komisi VII DPR RI ingin mendapatkan penjelasan dari Menteri Perindustrian Republik Indonesia untuk evaluasi kinerja pada tahun 2022 dan juga program prioritas tahun 2023 dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. APBN tahun 2023 harus dapat mendorong ekonomi berkualitas dengan penguatan industri nasional di berbagai sektor, termasuk pada level UMKM.

Kemudian topik yang juga sangat hangat adalah program hilirisasi mineral yang didukung oleh Presiden Joko Widodo, hal tersebut sejalan dengan rencana pelarangan ekspor berbagai mineral dari Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah.

Meskipun demikian, Komisi VII DPR RI melalui Panja Bauksit menemukan berbagai kendala, ketidaksiapan kita dalam menghadapi larangan ekspor tersebut. Di satu sisi pembangunan industri belum secepat yang kita harapkan.

Selanjutnya untuk efektifnya rapat kerja ini kami berikan kesempatan kepada Pak Menteri Perindustrian Republik Indonesia untuk menyampaikan pemaparannya.



Kami persilakan.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI (Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA, M.Sc.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore, selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom,
Om swastyastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan dan tentu salam sehat.*

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII DPR RI Pak Dony Mayadi Oekon, Bapak Maman Abdurrahman, Yang saya hormati, yang kami hormati segenap seluruh Anggota Komisi VII yang hadir baik secara fisik maupun *online* dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Perindustrian, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati Pimpinan dan segenap Komisi VII.

Saya di sini dihadiri oleh seluruh pejabat Eselon 1 kecuali Pak Irjen yang sedang kurang sehat, juga didampingi oleh seluruh SKM (Staf Khusus Menteri) dan pejabat Kementerian Perindustrian lain yang relevan dengan tema atau topik yang telah disampaikan kepada Kementerian Perindustrian, yang akan dibahas dalam Rapat Kerja kita pada siang hari ini.

Dan kami mendapatkan informasi bahwa beberapa hal yang akan dibahas, yaitu berkaitan dengan evaluasi kinerja tahun 2022, kemudian program prioritas tahun 2023 dan juga yang tak kalah pentingnya hilirisasi mineral, serta pembahasan topik lainnya.

Pertama-tama, tentu kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang telah berkenan untuk mengundang kami hadir dalam rapat kerja kita dengan agenda yang tadi sudah ditetapkan oleh Pimpinan Komisi VII sebagai pimpinan rapat.

Ada beberapa hal yang kami catat tadi, di mana tahun 2023 menjadi tahun yang penuh tantangan khususnya berkaitan dengan ketahanan pangan dan juga ketahanan energi. Di mana kita perlu untuk mencari solusi khususnya untuk diversifikasi sumber-sumber dari energi itu sendiri, kemudian juga tadi Pimpinan menyampaikan bahwa APBN masih menjadi instrumen penting untuk menggerakkan ekonomi dan keadilan negara, dalam tanda petik intervensi dalam mendorong ekonomi berkualitas tadi istilahnya Pak Ketua itu tentu dengan segala macam *policy* yang bisa di sebagai instrumen dari pemerintah itu sangat penting.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi VII.



Perjalanan pembangunan sektor industri pengolahan nonmigas di tahun 2022 masih diwarnai dengan gejolak dan tantangan, baik dalam negeri maupun global. Namun *alhamdulillah* dapat kita lewati dengan cukup membanggakan dengan hasil yang baik.

Sektor industri pengolahan nonmigas tetap memainkan peranan penting bagi perekonomian nasional, peran penting ini dapat dilihat dari kinerja makro sektor industri pengolahan nonmigas di beberapa indikator, antara lain:

Pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas pada tahun 2022 tumbuh sebesar 5,01%, ini lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan industri pada tahun sebelumnya 2021 yang tumbuh sebesar 3,67%.

Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas pada tahun lalu tahun 2022 sebesar 16,48%, meskipun belum mampu tumbuh di atas 20%. Namun kontribusi industri manufaktur masih merupakan yang tertinggi di antara sektor ekonomi lainnya.

Selanjutnya, ekspor industri pengolahan nonmigas terus meningkat, meski di tengah ketidakpastian global. Nilai ekspor industri pengolahan nonmigas tahun lalu 2022 mencapai 206,34 miliar dolar atau 70,67% dari total ekspor nasional. Angka ini telah melampaui capaian ekspor industri pengolahan nonmigas tahun lalu dan tahun sebelumnya 2021 yang tercatat sekitar 177,20 miliar dolar Amerika.

Realisasi investasi di sektor pengolahan nonmigas tahun 2022 mencapai 457,6 triliun atau sebesar 37,91% dari total investasi nasional. Angka ini telah melampaui nilai investasi industri tahun sebelumnya 2021 sebesar 307,58 triliun.

Adapun aspek ketenagakerjaan secara statistik sector industri pengolahan nonmigas menunjukkan pemulihan dari segi penyerapan tenaga kerja ada tambahan penyerapan tenaga kerja sebesar 400 ribuan orang di tahun 2022, sehingga jumlah total tenaga kerja di sektor ini kembali meningkat ke angka 19,11 juta yang dari sebelumnya 18,64 juta di tahun 2021.

Berbagai indikator positif selaras dengan nilai yang dicatat melalui IKI (Indeks Kepercayaan Industri) yang pernah kami laporkan kepada yang terhormat Anggota Komisi VII. Di mana nilai IKI (Indeks Kepercayaan Industri) pada bulan Desember 50,90 Desember 2022 dan kemudian pada Januari 2023 nilai IKI tersebut *alhamdulillah* naik menjadi 51,54 poin.

Selanjutnya sejak Indonesia masuk dalam penilaian PMI (*Purchasing Managers Index*) yaitu kita mulai masuk dalam survei PMI pada tahun 2011, Indonesia belum pernah dalam sejarahnya selama setahun penuh selalu ekspansi dan ini terjadi sepanjang 2022 yang lalu dan belum pernah juga dalam sejarah Indonesia tercatat 17 bulan berturut-turut PMI kita ekspansi.

Selain kinerja di atas dapat kami sampaikan juga beberapa kinerja Eselon 1 tahun 2022, ini secara singkat saja karena sudah kami laporkan. Yang



pertama, penumbuhan dan pengembangan WUB sebanyak 18.585 WUB yang telah dilatih dan 7.384 diantaranya telah memiliki perizinan berusaha. 1.242 IKM telah memperoleh pengembangan dan sertifikasi produk dan telah tumbuh 88 *startup* industri kecil berbasis teknologi. Yang kedua, telah dilaksanakannya program restrukturisasi mesin peralatan industri di bidang penyempurnaan kain dan percetakan kain. Di mana sebanyak 15 perusahaan telah dibantu dengan total potongan harga yang diberikan mencapai 5 miliar.

Selanjutnya lulusan tenaga kerja industri tingkat terampil dan ahli yang terserap di dunia kerja sebanyak 28.252 melalui Diklat *3 in 1* sebanyak 2.041 orang lulusan dari SMK dan sebanyak 4.233 orang lulusan dari pendidikan tinggi vokasi Kemenperin. Dan juga ada program fasilitasi sertifikasi TKDN sebanyak 1.837 produk.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi VII yang saya hormati.

Pelaksanaan anggaran Kementerian Perindustrian tahun lalu 2022 sampai 31 Desember 2022 terealisasi sebesar 98,13% dengan tingkat serapan tersebut, maka kami Kementerian Perindustrian berada pada tingkat 26 dari 82 kementerian lembaga, di mana rata-rata realisasi nasional sebesar 95,60%.

Realisasi anggaran Kementerian Perindustrian berdasarkan unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

- Sekretariat Jenderal 98,66%,
- Industri Agro 98,06%,
- IKFT 99,37%,
- Ilmate 95,82%,
- Ikma 98,68%,
- Irjen 99,05%,
- BSKJI 97,73%,
- KPAIL 99,66%, dan
- BPSDMI 98,08%.

Sedangkan realisasi berdasarkan jenis belanja, antara lain:

- Belanja pegawai 97,70%,
- Belanja barang 98,15%, dan
- Belanja modal 99,20%.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati.

Beberapa kegiatan prioritas Kementerian Perindustrian tahun 2023, tahun ini dapat kami sampaikan. Contohnya adalah yang pertama, Indonesia seperti yang pernah kami laporkan kembali dipercaya untuk menjadi *partner country* pada Hannover Messe 2023, suatu *event* internasional. Di mana pameran teknologi industri terbesar di dunia ini akan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 21 April 2023 di Hannover, Jerman. Hannover Messe 2023 tidak hanya sebagai ajang promosi bagi Indonesia, tetapi juga untuk menunjukkan persiapan dan kapabilitas sektor manufaktur Indonesia menuju era digital.



Event ini juga membuka jalan yang lebar bagi masuknya investasi ke dalam negeri, maupun kemitraan pelaku industri pada jaringan rantai suplai global atau global suplai *change* dan *Inshaallah* Presiden Joko Widodo bersama Counselor of Jerman Olaf Scholz akan membuka Hannover Messe tahun ini.

Program yang kedua adalah kegiatan WUB di daerah potensial dilakukan melalui bimbingan teknis kewirausahaan dengan proporsi 30% teori dan 70% praktek, serta fasilitasi mesin produksi dalam negeri atau memiliki sertifikat TKDN. Pada tahun 2023 diharapkan sebanyak 22.725 WUB yang dapat dilatih.

Selanjutnya untuk program pendidikan vokasi di bawah pengelolaan Kemenperin, salah satunya kami akan menyelenggarakan Diklat *3 in 1* untuk menyiapkan tenaga kerja yang langsung dapat bekerja di industri pada daerah potensial dan tahun, tahun ini tahun 2023 ditargetkan sebanyak 26.000 peserta.

Program berikutnya adalah P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk-Produk Dalam Negeri) Kementerian Perindustrian kembali memberikan fasilitasi sertifikat sertifikasi TKDN pada tahun 2023 sekurang-kurangnya 2.000 sertifikat produk dan guna mempercepat fasilitasi tersebut kami sudah menerbitkan 2 Permenperin.

Permenperin yang pertama adalah Permenperin Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Verifikasi Independen dan Pengenaan Sanksi Administratif dalam Rangka Penghitungan dan Verifikasi Besaran Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri dan Nilai Bobot Manfaat Perusahaan. Yang mana melalui Permenperin ini akan diberikan kesempatan bagi verifikator untuk dapat melakukan kegiatan verifikasi dan ini kami percaya akan mengatasi *bottle necking* dalam penerbitan sertifikat TKDN.

Dan Permenperin yang kedua, telah kami terbitkan adalah Permenperin Nomor 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk, untuk industri kecil. Ini khusus industri kecil yang memberi kemudahan bagi industri untuk melakukan *self assessment* dan semua dilakukan secara *online* nilai TKDN-nya dan seluruh prosesnya dilakukan secara gratis.

Dan ini kami sangat terbuka kerjasama dengan segenap Anggota Komisi VII melalui dapil masing-masing, di mana kami melihat bahwa semenjak terbitnya Permenperin Nomor 46 Tahun 2022 ini masih kecepatan dari penerbitan sertifikasi masih perlu didorong dan mungkin dengan kerjasama dari segenap Anggota Komisi VII yang bisa mengidentifikasi industri kecil-industri kecil di daerah masing-masing yang bisa kami bantu mendapatkan sertifikat TKDN.

Program berikutnya yaitu program restrukturisasi mesin atau peralatan industri tekstil sebagai upaya mengakselerasi peningkatan kinerja industri TPT



di pasca pandemi Covid-19. Adapun target perusahaan beserta program minimal 16 perusahaan.

Selanjutnya kami akan beralih kepada topik atau isu berikutnya yaitu terkait dengan hilirisasi.

Pimpinan Komisi VII dan segenap Anggota Komisi VII.

Terkait dengan hilirisasi industri berbasis pengelolaan sumber daya mineral logam, dapat kami sampaikan bahwa Kemenperin fokus pada 5 komoditas, yaitu:

1. Industri berbasis bijih tembaga,
2. Industri berbasis bijih besi dan pasir besi,
3. Industri berbasis bijih nikel untuk *stainless steel* dan bahan baku baterai,
4. Industri berbasis bauksit,
5. Industri berbasis monosit dan sumber potensial lainnya, seperti logam tanah jarang.

Berdasarkan data Kemenperin per 1 Februari 2023 terdapat 91 *smelter* di Indonesia dengan perincian 48 telah beroperasi dan lainnya dalam tahap *feasibilities study* atau konstruksi.

Sedangkan dari lokasi *smelter*, *smelter* terbanyak berada di Provinsi Sulteng sebesar atau sebanyak 25 *smelter*, kemudian Provinsi Maluku 22 *smelter*, Sultra 12, Kalbar 10 dan lainnya 34 *smelter* terletak di berbagai provinsi seluruh Indonesia.

Dari 48 *smelter* yang telah beroperasi berdasarkan komoditinya secara kumulatif *smelter-smelter* tersebut memiliki kapasitas investasi dan juga penyerapan tenaga kerja sebagai berikut:

1. *Smelter* nikel kapasitas produksi 262.560 ton, investasi 5,55 triliun, penyerapan tenaga kerja 2.337 orang.
2. *Smelter* besi baja kapasitas produksi 1,6 juta ton, investasi yang telah dikeluarkan 15,96 triliun, penyerapan tenaga kerja 2.729 orang.
3. *Smelter* tembaga kapasitas produksi 150.000 ton, investasi sejauh ini 266 miliar, penyerapan tenaga kerja 525 orang.
4. *Smelter* aluminium kapasitas produksi 544.563 ton, investasi sudah masuk 15,66 triliun, penyerapan tenaga kerja 1.893 orang.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi VII yang saya hormati.

Ilustrasi apabila dilakukan hilirisasi untuk komoditas yang akan dibatasi eksportnya, kami ingin menggambarkan potensi untuk penyerapan tenaga kerja, kapasitas produksi dan kebutuhan investasi. Yang pertama bauksit, pada tahun 2022 dalam data kami Indonesia mengeksport bijih bauksit dan konsentratnya sebesar 17,8 juta ton.

Apabila bijih bauksit ini dihilirisasi menjadi alumina maka dapat diproduksi sekitar 8,9 juta ton alumina yang akan dapat menyerap tenaga kerja

sebesar 13.000 orang dengan potensi kebutuhan investasi sebesar Rp104 triliun.

Apabila dilakukan hilirisasi dari alumina menjadi aluminium ingot akan menjadi 4,5 juta ton aluminium ingot yang dapat menyerap tambahan tenaga kerja sebesar 36.885 orang dengan nilai investasi atau kebutuhan investasi, sekali lagi kebutuhan investasi sebesar Rp455 triliun.

Untuk tembaga, tahun 2022 Indonesia mengeksport bijih tembaga dan konsentrasinya sebesar 3,1 juta ton. Apabila dilakukan hilirisasi menjadi katoda tembaga, kami hitung dapat menyerap tenaga kerja sebesar 1.045 orang dan kebutuhan investasi sebesar Rp5,5 triliun.

Untuk nikel, bijih nikel dan konsentrasinya saat ini sudah dilarang ekspor. Sehingga potensi hilirisasi dimulai dari feronikel atau NPI jumlah ekspor feronikel NPI sebesar 5,8 juta ton. Apabila dilakukan hilirisasi ke slab stainless steel akan dapat menyerap tambahan tenaga kerja sebesar 8.661 orang dengan kebutuhan investasi tambahan Rp15 triliun. Sedangkan apabila dilakukan hilirisasi menjadi *hotraw stainless steel* ini akan dapat menyerap tambahan tenaga kerja 5.573 orang dengan kebutuhan investasi Rp8,5 triliun.

Pimpinan Komisi VII, Bapak-Ibu Anggota Komisi VII yang terhormat.

Selanjutnya sebagaimana arahan dari Bapak Presiden terkait larangan impor aspal mulai tahun 2024, kami di Kemenperin telah menyusun peta jalan hilirisasi aspal buton untuk optimalisasi utilisasi akses pasar dan juga peningkatan kapasitas melalui investasi.

Salah satunya yaitu melalui investasi pabrik ekstraksi Asbuton menjadi aspal murni dan pengembangan kapasitas Pabrik Asbuton murni dan diharapkan kapasitas produksi yang dapat dihasilkan sebesar 500 ribu ton per tahun pada tahun 2027 dengan nilai kebutuhan investasi sebesar 4 triliun, ini estimasi sampai dengan tahun 2026.

Pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan, industri pengolahan silika sebagai bahan baku fotovoltaik atau PV solar panel dan semi konduktor bahwa rantai nilai industri ini masih banyak kekosongan atau belum tersedianya industri pada industri hulu dan intermediet atau antara, oleh karena itu dibutuhkan peningkatan investasi pada rantai tersebut.

Dalam melakukan peningkatan investasi silika, Indonesia memerlukan peningkatan investasi pada industri metallurgical silikon kapasitas 32.000 metrik ton pertahun dengan nilai kebutuhan investasi 300 juta dolar Amerika. Kemudian industri poli silikon kapasitas 6.500 MT per tahun dengan nilai investasi 373 atau kebutuhan investasi 373 juta dolar Amerika dan industri ingot monokristalin dan wafer kapasitas 1 GWp per tahun dengan kebutuhan nilai investasi 85 juta dolar.

Terkait dengan rencana investasi tersebut diusulkan pembatasan ekspor bahan baku mentah silika melalui neraca komoditas dan juga



percepatan-percepatan investasi industri intermedien. Untuk ilmenit merupakan mineral krisis hasil produk samping pengolahan timah zirkon dan pasir besi, yang mengandung logam sangat-sangat berharga yaitu titanium.

Indonesia yang selama ini mengeksport ilmenit mentah dan lucunya mengimpor kembali produk turunannya dengan nilai yang besar, seperti titanium dioxide, *white pigment* dengan nilai impor yang didatangkan ke Indonesia sebesar 272 juta dolar Amerika data di tahun 2022.

Untuk mendukung dilaksanakannya larangan ekspor bahan mentah, termasuk ilmenit pada Bulan Juni 2023 perlu adanya investasi pengelolaan ilmenit yang kami sudah hitung kebutuhannya sebesar 85,8 juta dolar Amerika dan ini untuk memproduksi Titanium Slag 33.000 ton per tahun yang kemudian dapat diolah menjadi titanium dioxide *white pigment* juga 33 ribu ton per tahun yang merupakan produk hilir, di mana *demand* dalam negerinya sedang tinggi. Kami mendapatkan kebutuhan investasi ini didasarkan pada angka investasi di negara-negara lain untuk komoditas-komoditas yang telah kami sampaikan tadi di atas.

Bapak-Ibu sekalian.

Selanjutnya industri perhiasan, industri perhiasan menjadi salah satu sektor yang penting dalam memacu perekonomian nasional. Oleh karena itu hilirisasi industri perhiasan emas menjadi salah satu perhatian kami, dapat kami laporkan kondisi saat ini bahwa emas granula hasil produksi perusahaan pertambangan emas di dalam negeri diekspor ke luar negeri untuk dijadikan emas batangan yang nantinya emas batangan bakalan tersebut akan diimpor kembali oleh produsen emas perhiasan masuk Indonesia sebagai bahan baku pembuatan emas perhiasan.

Emas granula diekspor ke luar negeri karena sebelumnya dikenakan PPN 10% ini berdasarkan Undang-Undang 42 Tahun 2009, sementara emas batangan merupakan bukan objek pajak. Namun saat ini emas batangan selain untuk cadangan devisa negara, termasuk emas granula telah mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut dengan terbitnya PP Nomor 49 Tahun 2022.

Tetapi karena PP tersebut terbit di Bulan Desember tahun 2022, sedangkan perusahaan pertambangan telah menyampaikan RKAB atau rencana kerja dan anggaran belanja pada tahun 2023 di tahun sebelumnya, maka produsen perhiasan dalam negeri belum bisa membeli emas granula dari perusahaan pertambangan di dalam negeri.

Oleh karena itu, kami pemerintah Kementerian Perindustrian membutuhkan dukungan khususnya dari DPR RI melalui Komisi VII untuk skema pembiayaan industri perhiasan di dalam negeri bisa melalui Bullion Bank, di mana emas granula hasil produksi dari perusahaan pertambangan emas di dalam negeri dapat diserap oleh Bullion Bank.

Dengan adanya Bullion Bank maka produsen emas perhiasan di dalam negeri bisa membeli atau meminjam emas granula, atau emas batangan dalam



bentuk emas granula atau emas batangan dan dikembalikan lagi dengan bentuk yang sama, sehingga tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga emas.

Selain itu dengan adanya Bullion Bank bisnis proses menjadi lebih efektif karena *shipping cost* yang lebih kecil, jarak lebih dekat di dalam negeri, tidak perlu biaya untuk mencetak emas granula menjadi batangan di perusahaan *refinery* di luar negeri dan tidak perlu melebur kembali emas batangan di industri perhiasan.

Kita perlu mendorong perusahaan pertambangan emas di dalam negeri untuk merevisi dokumen RKAB agar bisa segera memenuhi kebutuhan bahan baku emas perhiasan di dalam negeri. Sayangnya saat ini perusahaan pertambangan emas di dalam negeri telah terikat pemasaran emas granulanya 100% untuk tujuan ekspor sesuai dengan RKAB yang telah disetujui oleh Kementerian ESDM.

Pimpinan Komisi VII dan segenap Anggota Komisi VII yang kami hormati.

Selanjutnya akan kami laporkan kekuatan ekspor Indonesia yang tadi kami sampaikan di awal didominasi oleh industri manufaktur dan ini bisa kita lihat dan terbukti telah memperkuat Devisa Hasil Ekspor atau DHE. Karena itu Bapak Presiden memberikan arahan agar devisa hasil ekspor yang notabene 70% berasal dari ekspor manufaktur dapat dimanfaatkan kembali untuk hilirisasi sektor SDA dan memajukan proses industrialisasi yang ada di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, yang telah menggariskan bahwa hilirisasi menjadi sasaran utama bagi pembangunan industri nasional. Selain itu dalam RPJMN 2020-2024 telah ditegaskan bahwa pada tahun 2024 kontribusi industri manufaktur nasional terhadap PDB mencapai 21% sekarang baru sekitar 16,8% karena itu berbagai terobosan solusi harus kita cari, termasuk DHE atau dana hasil ekspor yang pemanfaatannya seharusnya dikembalikan untuk industri manufaktur.

Lebih lanjut untuk mendukung hal tersebut sekarang pemerintah sedang dalam tahapan proses melakukan revisi PP 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA adalah devisa hasil kegiatan ekspor barang yang berasal dari kegiatan perusahaan, pengolahan dan/atau pengolahan sumber daya alam.

Saya ulangi agar lebih sederhana, pemerintah sekarang sedang membahas finalisasi revisi PP 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor. Di mana nanti dalam PP tersebut akan diatur kewajiban repatriasi dan juga kewajiban retensi, sebagai *benchmarking*, ingin kami sampaikan bahwa untuk Thailand, di Thailand sebagai tanda petik kompetitor utama Indonesia dalam sektor manufaktur. Di Thailand diberlakukan bahwa usaha yang menghasilkan DHE dengan nilai 1 juta dolar ke atas diwajibkan untuk memarkirkan dananya di dalam negeri selama 360 hari sejak tanggal ekspor. Di Turki eksportir wajib menaruh dana hasil ekspornya di Bank Turki paling lama, paling lambat 180



hari juga wajib repatriasi untuk 80% dari DHE-nya termasuk konversi ke mata uang lokal.

Atas rencana revisi PP tersebut, kami di Kementerian Perindustrian juga akan menyiapkan regulasi yang akan mendukung, sehingga benar-benar DHE itu bisa dimanfaatkan kembali untuk sektor manufaktur. Pada prinsipnya ada beberapa poin penting yang kami akan upayakan dalam pemanfaatan DHE, yaitu yang pertama pemanfaatan DHE dan hasil ekspor sumber daya alam diarahkan untuk restrukturisasi mesin peralatan, percepatan penerapan revolusi industri 4.0, investasi pembangunan di sektor industri pioneer dan industri strategis, modal usaha kompetitif bagi hilirisasi industri dan juga industri yang berorientasi ekspor.

Ini dalam beberapa rapat bersama Bapak Presiden ini dipetakan bahwa potensi penanaman modal dalam negeri itu masih bisa didorong dan kami percaya dengan adanya aturan baru revisi dari PP 1 mengenai DHE ini bahwa nanti kita akan jauh lebih likuid dan perbankan devisa, bank-bank devisa akan bisa menyalurkan dana dari hasil ekspornya untuk kepentingan industri.

Kemudian ada dua alternatif lembaga pembiayaan seperti yang diketahui oleh Pak Pimpinan dan segenap Anggota Komisi II, Komisi VII mohon maaf. Dalam Undang-undang, dalam Undang-undang 3 Tahun 2014 ini diamanatkan bahwa harus dibentuk apa yang disebut dengan LPPI. LPPI itu adalah Lembaga Pembiayaan Pembangunan Industri, tetapi masalahnya kalau kita mengikuti jalur dari Undang-Undang 3/2014 tersebut dengan membentuk LPPI, itu lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang 3 bahwa LPPI harus dibentuk melalui undang-undang, jadi akan lama lagi.

Jadi oleh sebab itu kami mencari solusi alternatif di mana nanti bank devisa yang akan menampung parkirnya dana-dana hasil ekspor itu akan memberikan atau melakukan distribusi kepada lembaga yang sudah ada, seperti contohnya PT SMI atau melalui penguatan LPPI.

Seperti yang tadi kami sampaikan regulasi yang berkaitan dengan pemanfaatan DHE ini akan segera disusun dan Kemenperin diharapkan agar bisa menjadi *leading sector*. Jadi sayang kalau misalnya ekspor nasional yang 70% kontribusi dari manufaktur itu tidak banyak yang kemudian disalurkan kembali ke manufaktur. Saya tidak mengatakan bahwa sektor lain tidak penting, sektor lain juga penting tapi barangkali kita semua sepakat bahwa manufaktur sudah membuktikan sebagai kontributor terbesar bagi perekonomian nasional.

Selanjutnya langsung ke slide 42, ini kami melaporkan sedikit saja berkaitan dengan harga HGBT, ini tidak terkait dengan agenda berkait dengan Permen ESDM tapi melaporkan mengenai HGBT. Secara umum penyerapan gas bumi pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020, walaupun terdapat penambahan alokasi HGBT. Penyerapan HGBT naik dari 78,78% pada tahun 2020 menjadi 86,72% pada tahun 2021 dan sampai Agustus 2022 penyerapannya mencapai 84,13%.



Kami percaya Bapak Pimpinan dan segenap Anggota Komisi VII sudah pernah mendapatkan pemaparan dari pejabat kami berkaitan dengan manfaat yang luar biasa dari kebijakan HGBT tersebut. Namun demikian dapat kami sampaikan bahwa di lapangan terdapat berbagai masalah dalam pelaksanaan *policy* HGBT ini, yang dapat kami rangkum menjadi tiga bagian yaitu:

Yang pertama, industri mengalami pembatasan pasokan gas bumi di bawah volume kontrak, di bawah kontrak. Ini terjadi banyak di Jawa Timur, terjadi pembatasan di Jawa Timur terjadi pembatasan kuota antara 27 sampai 80% dari kontrak dan pengenaan *surcharge* harian untuk kelebihan pemakaian dari kuota yang telah ditetapkan dan ini hampir dirasakan oleh seluruh perusahaan, seperti Madu Lingga Rahardja, Petrowidada, Ispatindo, dan sebagainya, dan lain sebagainya.

Kluster yang kedua yaitu industri menerima gas bumi dengan harga di atas 6 dolar per MMBTU, ini beberapa contoh misalnya PT Domas Agro Inti Prima mendapatkan harga gas bumi 8,6 MMBTU. Bahkan kami mendapat laporan dari salah satu perusahaan di Kalimantan, saya *nggak* perlu sebut dalam rapat ini, mereka di arahkan untuk mau menandatangani, menandatangani kontrak gas sebesar 14 dolar Amerika per MMBTU. Ini suatu hal yang kami hadapi, kami temui di lapangan.

Kluster yang ketiga, industri belum menerima harga gas bumi tertentu. Ini seluruh industri yang direkomendasikan oleh Menteri Perindustrian, mulai April 2021 sampai Agustus 2022 yang belum menerima HGBT. Contohnya Aneka Industri, Krakatau Posko dan 100 industri lainnya.

Pimpinan Komisi VII, segenap Anggota Komisi VII yang kami hormati.

Selanjutnya terkait dengan perkembangan pabrik amonia urea dan metanol di Papua Barat yang merupakan atau sudah diterapkan sebagai PSN proyek strategis nasional. Ini dapat kami laporkan bahwa pabrik metanol direncanakan akan dibangun di area 7, di area BP Tangguh sementara pabrik amonia urea akan dibangun di Fior Kabupaten Fakfak.

Pabrik ammonia urea akan dioperasikan oleh PT KPT Pupuk Kalimantan Timur, sementara pabrik metanol akan dioperasikan secara *joint venture* antara PT Pupuk Indonesia dengan Sojitz Corporation.

Kami berharap dukungan dari Komisi VII, Pimpinan Komisi VII dan juga seluruh Anggota Komisi VII bahwa kebutuhan bahan baku gas untuk proyek-proyek yang saya sampaikan tersebut itu bisa terpenuhi, bisa dialokasikan oleh lembaga atau kementerian terkait.

Pimpinan Komisi VII dan segenap Anggota Komisi VII yang terhormat.

Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan pada rapat kerja hari ini dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas dukungan Pimpinan dan Anggota Komisi VII pada pelaksanaan program kami tahun lalu 2022, serta



kami mengharapkan dukungan kembali pada pelaksanaan program anggaran tahun 2023 untuk pembangunan industri nasional.

Terima kasih atas perhatiannya, kami serahkan kembali kepada Pimpinan dan mohon arahan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Menteri atas pemaparan dan penjelasannya.

Selanjutnya saya persilahkan dari Anggota Komisi VII DPR RI untuk melakukan pendalaman, dengan memberikan tanggapan dan pertanyaan sesuai protokol kesehatan dan Tata Tertib DPR RI, mohon Bapak-Ibu Anggota waktu bertanya maksimal 5 menit. Diawali dari Fraksi PDI Perjuangan silakan, Golkar silakan Pak Bambang.

Silakan Mas.

F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Baik, terima kasih pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati Pimpinan beserta Anggota Komisi VII,
Yang kami hormati Bapak Menteri beserta jajarannya.

Selamat sore,
Selamat datang di Komisi VII.

Hiasan bunga di atas peti,
Terasa indah bunga melati,
Sungguh senang rasa di hati,
Dapat berjumpa dengan Bapak Menteri.

Kan *gitu* dulu harus kasih pantun sedikit, orang Babel kan.

Baik Pak Menteri, pertama-tama kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas paparannya tadi dan tentunya informasi yang disampaikan oleh Pak Menteri, kami pikir komprehensif dan mencerminkan bagaimana baiknya dan positifnya kinerja Kemenperin di tahun 2022.

Kita melihat dari penyajian ini bahwa bagaimana capaian Kemenperin di dalam menopang perekonomian Indonesia, inikan luar biasa nih 70,67% kontribusi ekspor nonmigas, ya kan? Kemudian juga tentunya 28,7% kontribusi penerimaan pajak dan sebagainya-dan sebagainya.



Ini yang kami minta untuk tetap dipertahankan untuk dikejar sebagai apa namanya pembandingan yang akan lebih baik di tahun 2023. Kami juga memberikan apresiasi Pak Menteri, ini kan kita melihat bagaimana angka *purchasing managing* indeks atau PM Indonesia.

Kita lihat ini dari Mei 2021 sampai Januari 2023, memang ada 2 bulan, 3 bulan itu di bawah 50 indeksnya tapi semuanya di atas 50. Artinya apa? Artinya bahwa ketika indeks ini di atas 50 artinya industri Indonesia, industri *manufacture* ini sedang ekspansi dan tumbuh. Dan ini yang kami berikan apresiasi dan kami minta untuk dipertahankan karena artinya apa? Kemenperin mampu menjaga dan mengarahkan pertumbuhan daripada industri Indonesia, di saat tantangan ekonomi global yang begitu kompetitif dan tak terarah pada saat ini. Untuk itu kami ingin minta untuk dipertahankan.

Kemudian juga kita melihat bagaimana pelaporan daripada kinerja anggaran di tahun 2022, ini kan rata-rata nasional 95,6 ternyata Kemenperin 98,13 dan merupakan peringkat 26 dari 82 kementerian/lembaga dan ini patut kami berikan apresiasi dan tentunya mudah-mudahan di tahun 2023 juga akan lebih baik pencapaiannya.

Kemudian juga, kami ingin menanggapi tentang beberapa program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini kan ada yang langsung bisa dirasakan masyarakat, seperti pada IKM atau kemudian pada program-program pelatihan pada balai. Ini mudah-mudahan bisa terus dilaksanakan juga di tahun 2023, tapi izin interaktif Pimpinan.

Ini mudah-mudahan Pak Menteri, ini beberapa program-program pada IKM maupun pada program-program balai untuk di tahun 2023 ini tidak terkena *automatic adjustment*. Ini kira-kira bagaimana? *Nggak*-lah ya karena ini betul-betul pesan dari kami, ini aspirasi dari masyarakat, aman Pak Menteri ya. Sehingga kenapa? Masyarakat betul-betul merasakan manfaat daripada program-program ini di saat kita ingin pulih iya kan, ekonomi pulih dari keterpurukan pasca pandemi ini. Kita kan mottonya pulih lebih cepat bangkit lebih kuat, kan seperti itu kalau aman berarti aman *nih* kawan-kawan. Jadi kita bisa mengabarkan informasi yang baik ini kepada masyarakat pada dapilnya masing-masing.

Kemudian saya pikir agak sedikit detail ini Pak Menteri, terkait dengan hilirisasi pada beberapa mineral. Saya ini berasal dari Bangka Belitung, ini daerah pertimahan ketika orang menambang timah mineral ikutannya, mineral ikutannya banyak Pak Menteri dan salah satunya ada dibahas oleh Pak Menteri di dalam paparan yang disampaikan ini kepada kami, misalkan ilmenit.

Ilmenit ini tantangan di dalam pengusahaannya ya ini sebetulnya lebih kepada persoalan asal-usul barang saja. Sampai hari ini ya kan boleh saja, Kemenperin membuat satu apa namanya perencanaan, tetapi juga harus memikirkan sektor hulunya karena kenapa? Ini harus kita *clear*-kan.

Sektor hulunya ini IUP ilmenit se-Indonesia ini tidak banyak dan kalau dikatakan potensi kita 33.000 ton bisa saja karena memang ketika menambang timah itu bisa saja ditemukan 20-30%-nya ada mineral ikutannya adalah Ilmenit. Jadi kalau produksi timah Indonesia antara 70-80.000 ton ya kurang lebih, kurang lebih lah 33.000 tahun ini, ini potensi yang bisa kita maksimalkan.

Tapi saya pikir perlu dipikirkan bagaimana untuk menciptakan industri di dalam pengolahan ilmenit ini, ini kan titanium I-02. Memang teknologinya yang belum ada, teknologinya yang belum ada, orang kalau dalam mendapatkan ilmenit ini ada 3.

Yang pertama itu tentu dari tailing, jadi pertama menambang timah ketika menambang dapat mineral ikutan. Yang kedua, dari tailing timah ada pengolahan Pak Menteri kalau di Bangka Belitung itu. Jadi dia mengolah tailing kemudian dipisahkan dengan meja goyang istilah kita itu akan dapat beberapa mineral, salah satunya ilmenit ini. Kemudian yang ketiga itu cara mendapatkan ilmenit itu dari slag timah, ketika orang melebur, melebur timah slag-nya itu mengandung ilmenit.

Hal seperti ini saya pikir ini hal teknis tetapi perlu juga dipahami dari Kementerian Perindustrian sebagai pihak regulator, sehingga kemudian bisa kira-kira menciptakan ruang untuk investasi bagi pengolahan ini karena memang dari informasi yang dipaparkan ini memang betul, kebutuhan untuk industrinya besar iya kan untuk *coating*, *chart* dan sebagainya.

Tetapi tidak hanya itu saja bahwa ketika mineral ikutan yang lain juga ada zirkon dan sebagainya ini juga tolong nanti diperhatikan, seperti monasit juga ini mengandung apa, mengandung radioaktif tetapi juga mengandung logam tanah jarang, kalau di ekstrak itu lanthanum dan sebagainya, dan sebagainya.

Kemudian Pak Menteri yang berikutnya terkait dengan kegiatan perindustrian, saya agak gelisah ketika membaca berita misalkan di tahun 2023 ini, ada rencana pemerintah untuk menerapkan cukai plastik. Cukai plastik ini kalau menurut saya, ini hanya menambah beban bagi pengembangan industri perplastikan, ini kasihan Pak Menteri.

Maksud kami ini masukan saja, bisalah disampaikan kepada Bu Sri Mulyani jangan segalanya mau dipajakin, yang susah itu nanti Kementerian Perindustrian targetnya tinggi tetapi tidak pernah diberikan fasilitas iya kan di dalam bagaimana menjalankan dan mengawali semua.

Belum lagi persoalan-persoalan regulasi fiskal PPN yang memberatkan pada pengolahan pertimahan dan sebagainya-sebagainya. Jika memang regulasi fiskalnya memberatkan tidak akan menciptakan iklim investasi yang kompetitif, apalagi sekarang kita masyarakat ekonomi ASEAN, impor dan ekspor sesama di kalangan negara Asean itu tidak ada bea, sehingga orang akan muter menghindari PPN. Akibatnya apa? Indonesia hanya akan menjadi *market* saja.

Yang terakhir Pak Menteri, ini masukan saja dari kami, apa namanya terkait dengan apa yang kami temukan ketika kami kunjungan ke lapangan ke GNI misalnya, yang ribut beberapa hari yang lalu itu. Saya tidak mempermasalahkan persoalan bagaimana regulasi dan sebagainya, tetapi produk yang dihasilkan daripada beberapa *smelter* ini kami melihat apa yang dihasilkan dengan investasi yang katanya besar, fasilitas yang juga diberikan juga besar sampai dengan *master list*, *tax holiday* dan sebagainya, tetapi yang mereka hasilkan itu cuma feronikel dengan kadar MPI 10-12%, nilai tambahnya sedikit.

Berarti ketika kandungan feronikelnya, nikelnya cuma 10 sampai 12%, berarti ada kandungan lain 88-90% mineral lain yang *nggak* bayar pajak Pak Menteri. Dan ini saya pikir bisa menjadi bahan evaluasi, masukan juga kepada Bapak Presiden bahwa investasi-investasi itu juga harus disaring juga, sehingga tidak merupakan hal-hal yang kemudian menyebabkan kita jebol secara halus seperti itu.

Saya pikir itu masukan dari kami Bapak Menteri, atas waktu dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih.

Sungguhlah semak padang ilalang,
Tak kan habis ditebas bersih,
Omongan saya tak perlu panjang,
Saya pikir sekian dan terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore semua.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Bambang.

Lanjut dari Fraksi Gerindra, silakan Pak Ramson.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Terima kasih Ketua.

Saya dengar tadi Fraksi Golkar mau berdua yang mau bicara.

KETUA RAPAT:

Silakan lanjut.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semuanya.



Pak Ketua Rapat dan teman-teman Anggota yang terhormat,
Pak Menteri dan jajarannya yang saya hormati.

Terima kasih ini penjelasannya cukup komprehensif dan tersirat optimisme untuk republik ini, jadi pantas saya lihat ada peningkatan penerimaan negara. Kalau mungkin ada *automatic adjustment* mungkin karena pergeseran belanja aja mungkin ke IKN atau ke mana, tapi dari sisi penerimaan negara saya dengar-dengar cukup bagus tahun 2022.

Dari penjelasan ini di sini bahwa kontribusi terhadap PDB dari sektor perindustrian cukup bagus, tapi yang terbaik ini kontribusi ekspor 70,67%, ekspor industri pengolahan nonmigas. Bisa interaktif Pak Ketua ya, kalau 70,67% ini dari seluruh total *eksport*, dari seluruh total *eksport* ya Pak Menteri?

MENTERI PERINDUSTRIAN RI (Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA, M.Sc.):

Dari seluruh total *eksport* Pak, nasional, dari segala macam sektor Pak.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Yang nonmigas Pak ya? Jadi.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI (Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA, M.Sc.):

Yang nonmigas betul.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Jadi termasuk hasil tambang atau komoditi juga termasuk kalau 100% itu termasuk komoditi Pak ya, berarti ya terbesar sektor industri 70,67% luar biasa besarnya. Saya juga tidak terpikir bahwa rasionya sudah sebesar itu dari total ekspor karena biasanya kita hanya mengandalkan ekspor hasil komoditi.

Berarti industri kita, pengolahan kita atau hilirisasi sudah berkembang pesat, jadi nilai tambahnya cukup tinggi dan *multiplier* efeknya juga cukup besar dan ini saya lihat menyerap tenaga kerja 19,11 juta orang, itu Agustus 2022 mungkin sekarang sudah berkembang pesat karena sekarang kan sudah apa namanya, sudah bebas, sudah *nggak* pandemi lagi.

Sekarang malah indikasinya jalannya sudah macet, sudah lebih macet dari tahun 2019 tadi saya baca, itu indikatornya jadi memang luar biasa di sektor industri. Kontribusi investasi juga cukup besar dan kontribusi penerimaan pajak.

Terus yang menarik juga mengenai upaya Kementerian Perindustrian terkait devisa hasil ekspor. Tadi saya mendengarkan penjelasan Pak Menteri, ini juga hal yang baru buat saya hanya pertanyaan saya interaktif lagi Pak

Ketua. Apakah bisa Kementerian Perindustrian mempengaruhi bank sentral dan juga ke Menteri Keuangan, sehingga seperti yang dijelaskan tadi bahwa devisa hasil *ekspor* harus terepatiasi, artinya kembali ke wilayah Indonesia. Artinya dana-dana hasil *ekspor* tersebut, itu apakah ada potensi bisa direalisasikan ya Pak Menteri.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI (Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA, M.Sc.):

Mohon izin Pimpinan, boleh langsung? Baik.

Ada dua yang terhormat Pak Ramson, yang pertama revisi PP 1 ini akan mengatur mengenai lalu lintas dari devisa itu sendiri, hanya lalu lintasnya. Di mana nanti diwajibkan bagi eksportir khususnya DHE atau Dana Hasil Ekspor yang berasal dari manufaktur, itu untuk pertama merepatiasi dananya.

Kedua, dia harus melakukan retensi dan yang ketiga sedang dihitung diwajibkan melakukan konversi dari dolar ke rupiah. Tapi itu masih dihitung karena ada plus-minusnya untuk dikonversi dari dolar ke rupiah.

Jadi Ketua, jadi *once* PP itu nanti sudah direvisi, sudah diketok memang wajib hukumnya untuk dalam tanda petik diparkir. Kemudian pertanyaan berikutnya yang terhormat Anggota Komisi VII Pak Ramson, pertanyaan berikutnya dana yang sudah terparkir ini yang *ruffly*, ini *ruffly* Pak, tolong teman-teman media jangan dikatakan ini pasti, ini *ruffly* perhitungan-perhitungan kasar kita, itu akan memarkir sekitar 50 billion dolar terhadap atau ada di dalam sistem perbankan devisa kita.

Nah itu pertanyaan besarnya mau dikemain dana ini? Mau didistribusikan ke mana? Maka oleh sebab itu kami akan melakukan inisiatif ini atas dukungan dan izin dari Komisi VII untuk menerbitkan satu regulasi, di mana intinya regulasi tersebut adalah memanfaatkan DHE yang telah diatur dalam revisi PP 1 tadi.

Jadi nanti akan ada 2 regulasi. Regulasi yang satu mengatur mengenai pemanfaatan. *Nah* ini pemanfaatannya nanti akan *rigid* karena nanti pasti akan keributan ya sektor-sektor lain yang juga menganggap dirinya penting juga pasti rebutan untuk mendapatkan dana tersebut, dana dari DHE ini.

Itu jawaban kami.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Sedikit lagi Pak Menteri, ini original idenya Kementerian Perindustrian?

MENTERI PERINDUSTRIAN RI (Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA, M.Sc.):

Bukan, ini pemerintah Pak tapi pemanfaatannya kami. Pemanfaatannya itu *original* dari kami, kami akan sebut saja kalau ini boleh dikutip akan *fight*



agar supaya pemanfaatan DHE itu akan sebesar-besarnya, sepenuhnya akan dikembalikan kepada sektor manufaktur.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Terima kasih Pak Menteri.

Pak Ketua, ini luar biasa ini penjabaran dari nasionalisme di dalam kebijakan-kebijakan aktual negara. Ini luar biasa, bayangkan dana sebesar itu 50 billion US dolar itu bagaimana nanti perputarannya itu *turn over*-nya menghasilkan *multiplier effect* yang sangat besar.

Bangsa ini akan makin kompetitif, akan makin kompetitif dan banyak inovator-inovator dan juga *entrepreneur-entrepreneur* nanti yang bisa didukung pembiayaannya Pak Menteri dengan dana sebesar ini. Ini luar biasa, saya hormat dengan ide ini dan juga dalam proses ini, mudah-mudahan berhasil karena nanti juga ini akan memperkuat posisi rupiah dengan, dari sisi moneter juga akan lebih bagus, dari sisi pembiayaan juga akan lebih bagus, dari sini pengembangan *entrepreneur-entrepreneur* atau inovator juga akan lebih bagus.

Jadi ini luar biasa ini saya salut dengan upaya ini karena baru saya mendengarkannya, apalagi dalam hal ini Kementerian Perindustrian sudah mempersiapkan langkah-langkah nanti penggunaan, pendistribusian dan penggunaan dana ini, sehingga tidak menjadi dana menganggur di republik ini karena kadang-kadang selama ini kan menganggur di luar negeri apa nongkrong di luar negeri, kalau ada dalam negeri ini luar biasa Pak Menteri.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI (Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA, M.Sc.):

Saya tambahkan Pimpinan.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Silakan Pak.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI (Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA, M.Sc.):

Dan itu dana yang tadi di parkir, di retensi di dalam negeri itu nanti kami akan upayakan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan investasi yang tadi telah kami sampaikan, ada yang sekian triliun untuk di mana, sekian triliun untuk di mana, itu yang nanti akan kami arahkan, sehingga hilirisasi, substitusi impor, pembentukan dari pohon-pohon industri itu betul-betul bisa terjadi dari dana ini.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Terima kasih Pak Menteri.



Pak Ketua, jadi konsep hilirisasi bukan hanya berat di konsepnya aja. Jadi ini saya melihat artinya sudah mempersiapkan langkah-langkah ketersediaan dana untuk proses hilirisasi karena proses hilirisasi kan membutuhkan investasi yang besar, selama ini kan persoalannya di situ.

Tapi dengan tersedianya dana ini proses hilirisasi berjalan, *added value*-nya juga meningkat luar biasa, akan memberikan lapangan pekerjaan yang sangat besar, juga *income* untuk negara juga akan sangat besar karena tambah tenaga kerja juga akan ada PPh Pasal 21-nya udah berapa itu aja. Artinya belum lagi penghasilan yang semakin besar, jadi sangat luar biasa kalau ini bisa direalisasikan saya pikir DPR RI apa namanya sangat penting untuk mendukung kebijakan ini.

Jadi terima kasih Pak Menteri, tadi penjelasan ini karena ini juga baru saya ikuti belakangan ini karena maklumlah sekarang DPR ini kan kebanyakan ke desa-desa. Apalagi saya ke kecamatan-kecamatan karena sudah terbanyak, seperti kemarin sampai minggu malam masih di daerah, 3 hari, 4 hari, program-program. Nanti ada program Ikma, saya ke daerah lagi gitu, ini aja staf saya udah lagi konsultasi dengan stafnya Bu Dirjen, untuk program di daerah.

Jadi kadang-kadang makanya saya senang kalau hadir rapat di sini kemampuan intelektual saya juga jadi apa namanya praktis lagi *gitu*. Kalau di sana kan yang penting *sowan*, apa, baik-baik kan *gitu* aja, tidak tinggi-tinggi itunya persaudaraan lah *gitu*. *Alhamdulillah sih* hasil survei terakhir di dapil saya tertinggi *rating* saya.

Terus yang berikutnya Pak Menteri, mengenai HGBT (Harga Gas Bumi Tertentu) memang ini masih memerlukan sinkronisasi lintas Kementerian, mungkin Kementerian ESDM persepsinya beda, sementara realitas di lapangan seperti tadi data-data itu sampai pabrik pupuk ada yang sampai harganya 15 US dolar per MMBTU. Jadi padahal dari sisi peraturannya kan Peraturan Menteri hanya sekitar 6 US dolar, jadi memang ini masih memerlukan sinkronisasi.

Terus mengenai *eksport industry manufacture*, saya pikir saya lihat juga perkembangannya cukup besar. Tadi saya pikir itu aja yang strategis, yang mau saya kemukakan, kalau soal anggaran-anggaran untuk sosialisasi di daerah-daerah dalam konteks pengembangan industri memang itu sangat diperlukan di daerah-daerah, itu sangat baik tetap saya senang tadi mendengarkan informasi tidak ada *automatic adjustment*.

Saya pikir itu aja Pak Menteri, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.



Terima kasih Pak Ramson.

Lanjut dari Fraksi Nasdem.

F-NASDEM (RICO SIA):

Baik, Pimpinan izin.

KETUA RAPAT:

Pak Rico, silakan.

F-NASDEM (RICO SIA):

Karena kebetulan Pak Menteri ada di sana, kita juga coba pakai baju kuning, pahami lah ya kira-kira *gitu*.

Terima kasih Pimpinan, terima kasih juga kepada rekan-rekan semua yang hadir secara fisik maupun *virtual*.

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Salam sejahtera untuk kita semua.*

Tadi apresiasi dengan penjelasan yang sudah diberikan dan juga sudah disampaikan oleh Pak Menteri, menjawab apa yang sudah ditanyakan oleh Pak Ramson yang, Bung Ramson karena kalau panggil Pak kayaknya ketuaan *nih*, harus Bung Ramson yang akan terpilih kembali di tahun 2027 *eh* salah ya 2024.

Pak Menteri, mungkin saya cuma satu terkait dengan dapil. Pabrik amonia, urea dan metanol di Papua Barat yang tadinya rencananya semuanya di Bintuni, tapi kemudian ada pengalihan ke Fakfak. *Nah* selama ini belum dapat penjelasan yang baik dan benar ini karena apabila dipindahkan ke Bintuni, *eh* dari Bintuni ke Fakfak tentunya nanti terkait dengan gas yang akan disuplai tadi akan menambah biaya.

Biaya tadi ini yang tanggung pakai uang negara atau dari pengusaha yang namanya PT Pupuk Indonesia dan Soljiz Corporation. Apabila ini nanti pakainya uang negara, apakah ini tidak merugikan dan bagaimana pengembaliannya tentunya seperti yang tadi yang cukup luar biasa sampai ke hilirisasinya.

Mohon interaktif Pimpinan, mungkin dari Pak Menteri siapa yang bisa menjelaskan begitu.

Terima kasih.



MENTERI PERINDUSTRIAN RI (Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA, M.Sc.):

Baik, mohon izin Pimpinan.

Jadi awalnya proyek Bintuni ini diinisiasi sudah sejak lama oleh kami di Kementerian Perindustrian. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sektor *petrochemical* di Indonesia, petrokimia awalnya seperti itu. Tapi memang ternyata agak lama prosesnya dan saya kira itu wajar karena mungkin ada dinamika pengembangan dari *interest* itu sendiri *with in* internal dari pemerintah, saya kira juga itu wajar.

Sehingga diputuskan oleh pemerintah bahwa proyek tersebut bukan dialihkan, tapi dipecah Pak Rico, dipecah menjadi dua. Yang pertama, proyek gas *to methanol* di Bintuni itu tetap dilakukan oleh Sojizc dari Jepang dan Sojizc sudah juga memiliki kerjasama dengan Republik Indonesia. Kemudian untuk pengembangan sampai ke vertilizer itu akan dikembangkan di Fior di Fakfak.

Sepanjang yang saya ketahui yang terhormat Pak Rico, tidak ada sama sekali walaupun ini PSN, walaupun ini PSN, tidak ada komitmen atau keharusan, atau janji dari pemerintah untuk mengembangkan termasuk infrastruktur yang tadi Pak Rico sampaikan, termasuk memindahkan gas dari Bintuni ke Fakfak, itu tidak menjadi bagian yang harus *disiapkan* oleh pemerintah.

Jadi semuanya nanti akan *b to b*, yang harus diperhatikan yang tadi saya sampaikan, yang kami betul-betul mohon dukungan dari Komisi VII agar karena yang di Bintuni ini sudah lebih awal kita persiapkan, sehingga kelihatannya akan lebih mudah untuk jalan, akan lebih mudah untuk dieksekusi. Sehingga memang membutuhkan untuk jalan, membutuhkan alokasi gas sebagai bahan baku, alokasi gas.

Nah itu alokasi gas itu pernah dikomitmen, dikomitmenkan oleh ESDM, *nah* itu yang kami betul-betul minta bantuan dari Pimpinan Komisi VII agar supaya proyek yang di Bintuni untuk gas metanol tetap jalan dengan adanya alokasi gas yang memang sudah dikomitmenkan, dikomitmenkan sebelumnya oleh Kementerian ESDM.

F-NASDEM (RICO SIA):

Terima kasih, Pak Menteri.

Satu lagi Pak Menteri, terkait dengan gas itu sendiri di Fakfak apakah nanti ini terkait dengan energi baru terbarukan yang untuk pabrik nanti ini. Apakah nanti setelah pabriknya berjalan, dari mana mereka mengambil di Fakfak itu, dari mana mengambil energi baru terbarukan untuk operasional pabrik tersebut.

Apakah diambil juga kembali dari Bintuni sebagai penghasil gas di sana atau akan apa namanya, akan dibangun juga mungkin sumber-sumber energi



lainnya sepertinya air dan lain sebagainya karena di Fakfak juga kan banyak air terjun juga di sana.

Yang saya maksudkan ini kan memang terlalu teknis ya, tapi sebagai masukan saja, jangan sampai akibat dari pemecahan tadi, kemudian yang timbul adalah *cost* besar akibat harus menyalurkan pipa ya. Akhirnya harus bangun lagi proyek pipa yang sekian triliun banyaknya untuk kemudian menghidupkan ini pabrik begitu.

Ini hanya masukan saja, jadi sebagai pertimbangan karena ini terlalu teknis *nggak* mungkin ada di Pak Menteri dan jajaran yang ada di sini. Cuma masukannya adalah ini menjadi satu perhitungan tersendiri mungkin nanti yang akan disampaikan kepada teman-teman yang lain pada saat ini benar-benar harus memang dieksekusi jalan ya. Memang sekarang sudah eksekusi jalan ya tapi sambil diperhitungkan kembali karena saya lihat ada sedikit ngeri-ngerri sedap juga kata teman kita yang dulu begitu.

Terima kasih Pimpinan, itu saja.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI (Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA, M.Sc.):

Boleh saya respon Pimpinan, 1 menit.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Menteri.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI (Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA, M.Sc.):

Saya kira respon saya cuma sederhana, terima kasih Pak Rico.

F-NASDEM (RICO SIA):

Terima kasih Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Iya, terima kasih Pak Rico dari Nasdem.

Lanjut dari PKB.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

PKB *nggak* ada.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Menteri.

F-PKB (H. MARWAN JA'FAR):

Terima kasih.

Kepada yang terhormat Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII yang saya hormati,
Pak Menteri Perindustrian dan seluruh jajaran yang kami muliakan.

Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, terutama dalam rangka yang pertama adalah dalam rangka mendorong program vokasi yang pernah kita usulkan di seluruh SMK di dapil saya ini terutama, di dapil 3 Jawa Tengah yang meliputi Pati, Rembang, Grobogan dan Blora. Ini saya mohon untuk segera di eksekusi terutama dalam kegiatan *industrial vocation week*. Ini juga saya kira untuk meningkatkan kreativitas dan intensitas kegiatan dalam kerangka yang lebih praktis, seperti kegiatan lokakarya atau magang di sejumlah industri manufaktur, pabrikasi dan mekanisasi serta industri lainnya. Ini saya kira penting untuk saya sampaikan karena ini titipan dari kampung ini.

Yang kedua adalah terkait program pembangunan fasilitas produksi fitofarmaka oleh Kemenperin dan saya juga mendorong dan mengapresiasi bahwa program itu sangat bagus karena beberapa kali telah kita ingatkan kepada Kemenperin semasa masa pandemi kemarin, termasuk Kemenperin membuat skala prioritas program pengolahan komoditas tanaman obat dan rempah-rempah.

Jadi ini juga kami apresiasi jika memang sudah berjalan dan juga program apa yang disebut dengan fitofarmaka atau istilahnya yang lain yaitu komoditas tanaman obat dari rempah. Konkretnya Kemenperin memang harus dapat memperluas kolaborasi pelatihan pendampingan dan fasilitasi dengan para petani dan para pekebun yang sudah atau dan akan berbisnis dalam skala IKM atau skala UMKM secara berkelompok.

Tujuannya adalah hingga saat ini dapat memproduksi secara lebih baik, secara ekstraktif komoditi, misalnya seperti jahe, lalu kunyit dan sebagainya. *Nah* apa namanya dalam konteks ini juga bukan hanya di tahap awal saja harapan kita, tetapi secara *sustainable product* harus berjalan secara terus-menerus dan hingga pengujian, maupun bimbingan pada masa pendahuluan produk tersebut.

Kemudian terkait yang poin yang kedua tadi adalah kami menyarankan agar Kemenperin tidak hanya terkonsentrasi membangun fasilitas, gedung fasilitasi produksi fitofarmaka di Jakarta saja, tetapi coba kita alihkan ke daerah-daerah yang memang dibutuhkan dalam rangka potensi itu. Justru karena di daerah-daerah juga banyak potensi dan sekaligus juga menjadi sentra komoditi bagi tanaman-tanaman obat. Tentu saja harus mengingat kesuksesan,



kesesuaian tanah dan iklim atau yang disebut bahasanya agak susah-susah ini agroklimat setempat. Agroklimat di daerah mana saja itu potensinya juga banyak dan saya kira perlu dibangun semacam gedung fasilitas produksi fitofarmaka.

Terkait hal tersebut saya kira kita bisa berkolaborasi dengan pemda atau kabupaten setempat atau dinas setempat, termasuk juga kita bisa berkolaborasi dengan Kementan Pak dan juga bisa kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta beberapa perusahaan farmasi besar karena peluang ini sangat cukup prospektif dan kita juga bisa melihat sebagaimana farmasi-farmasi besar, seperti apa namanya yang di Jepang, yang di Jerman dan seterusnya. Jadi ini mengundang investor kelas cakup atau multi nasional dan ini saya kira kalau ini dilakukan Kemenperin akan mendapatkan *legacy* yang baik.

Kemudian yang keempat adalah bahwa saya juga mendukung Pak program startup IKM dan ini juga berbasis teknologi dan tentu ini dalam konteks Indonesian Food Innovation. Sekaligus target melahirkan terkait sektor ini dan saya juga mendorong bahwa 40 IKM yang ada di seluruh Indonesia ini bisa berjalan pada tahun 2023 ini.

Kalau kita upayakan secara sungguh-sungguh ini bisa terlaksana secara masif, dari subsektor ke subsektor sejumlah pengolahan komoditas pangan, makanan dan minuman karena apa Pak? Karena potensi betapa sangat variatifnya dan besarnya skala yang bisa dicapai.

Apalagi kesadaran publik semakin, sekarang makin pintar karena dengan HP juga kita bisa melihat semuanya dan selektif dalam, khususnya dalam pengolahan pangan dan minimal mengandung Pak, yang minimal mengandung bahan kimia dan non-organik, minim pengawet, serta minim bahan penyadap disaat, disaat sekarang maupun di masa yang akan datang. Pengelolaan ini saya kira lebih higienis, inovatif dan menarik karena bahan akan memberi pangsa pasar yang besar tersendiri dan sekaligus tingkat *competitiveness*-nya juga besar.

Kemudian yang kelima Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, terkait program kemitraan antara industri pengolahan susu dengan koperasi produsen susu sapi atau kelompok peternak susu, bukankah secara tradisional sudah terjadi dan terutama di daerah Jawa Timur Pak misalnya Pasuruan, di Jawa Tengah misalnya di Boyolali, di Jawa Barat misalnya di Pangalengan dan daerah-daerah yang lain.

Tentu ini akan menjadi sasaran dan perlu prioritas tersendiri dan prioritas ini juga memberdayakan lebih lanjut kepada kalangan peternak kambing, terutama kambing entawah, entawah, etawa ya terutama kambing etawa dan produk susu ini saya kira tidak diprogramkan dalam bentuk yang sangat apa namanya parsial, tetapi disinkronkan dengan produksi dan komoditi kedelai sehingga bisa membuat kalangan UMKM itu bisa berjalan dengan baik.



Kemudian yang terakhir yang keenam, saya kira di mana saja termasuk program IKM ini tentu menjadi sasaran target yang cukup positif dan program restrukturisasi mesin industri terkait tekstil dan produk tekstil oleh Kemenperin ini bisa berjalan dengan baik di tahun 2023 ini dan bisa menjadi prioritas tertentu yang bisa diandalkan oleh Kemenperin.

Sekaligus para produsen tenun tradisional juga perlu dicarikan solusi yang lebih akseleratif bukan hanya mesin di beberapa daerah, tetapi songket, batik, daerah pakaian adat dan seterusnya saya kira juga bisa menjadi prioritas.

Oleh karena itu saya meminta kepada Kementerian Perindustrian bahwa latihan-latihan kita ini Pak akan jauh lebih baik kalau dibarengi dengan alat-alat yang dibutuhkan. Tentu ini menambah anggaran, apakah ada *refocusing* atau tidak itu bisa kita apa namanya kita lakukan.

Saya kira kalau yang di daerah-daerah pelatihan yang diberikan kepada kita itu, kalau memang itu dibarengi alat saya kira sangat senang dan sekaligus bisa mempraktekkan alat-alat tersebut.

Saya kira 6 poin itu yang saya sampaikan Pak Pimpinan, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih dari Fraksi PKB.

Lanjut, tapi sebelum saya lanjut ini waktu sudah maju saya perpanjang sampai 15.30 ya.

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Lanjut Fraksi Demokrat, silakan Pak Nasir.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Terima kasih.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VII dan seluruh Anggota Komisi VII,
Yang terhormat Saudara Menteri dan seluruh jajarannya.

Program yang dikerjakan oleh kementerian ini, kami meminta dari Komisi VII supaya program-program yang disampaikan ini ada pendampingan Pak Menteri. Pendampingan supaya peralatan maupun regulasi yang dilakukan kementerian ini bisa berkembang, *nah* jangan nanti peralatan-peralatan yang dibantu ini kalau *nggak* ada pendampingan yang dilakukan menurut kami nanti ini bisa jadi *mangkrak* semua, *nggak* berkembang *gitu*.



Nah kalau bisa disinkronkan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah besar untuk minta tenaga-tenaga ahlinya mendampingi regulasi yang kita buat program ini. Contohnya ada beberapa yang kita kembangkan untuk pengembangan produksi pakan ternak *gitu*.

Nah kami minta industri-industri pakan ternak ini bisa mendampingi regulasi ini, supaya perkembangan pakan ternak untuk industri kecil ini kualitas dan kemampuan pakan ini bisa setara lah dengan perusahaan-perusahaan yang, hampir-hampir setara lah kita bilang supaya bisa tercapai lah kualitas untuk peningkatan ternak-ternak masyarakat yang kurang mampu ini.

Dan kita kan mengutamakan bagaimana pakan ternak ini bisa murah buat masyarakat, *nah* kalau di kalangan-kalangan pasar kan ini namanya pelet kan harganya cukup tinggi. *Nah* mungkin butuh tekanan dan *support* dari kementerian supaya mendampingi regulasi ini, *nah* supaya bahan baku yang ada di masyarakat ini bisa dikembangkan, mencukupi hampir dengan bahan yang ada di pasar itu. *Nah* jadi kalau *nggak* didampingi seperti itu ya mungkin kemampuan dan kualitasnya tidak akan ketemu Pak Menteri.

Saya kan minta kemarin dengan beberapa peralatan untuk membuat pakan ternak, *nah* tapi perlu pendampingan-pendampingan menurut saya. Jadi dari industri-industri yang didalam regulasi Pak Menteri, mungkin kami bisa ini teman-teman yang mengelola pakan-pakan ternak ini maupun perbengkelan ini bisa digabungkan, bisa menjadi ada bimbingan lah, bimbingan rutin mungkin berkala yang bisa membuat supaya teknologi lebih bagus, kualitasnya lebih bagus, supaya jangan seperti yang sudah mereka buat seperti itu saja. Jadi kualitasnya *nggak* tercapai *gitu*, *nah* jadi mungkin itu yang penting bagi kami Pak Menteri, supaya anak-anak nanti yang dididik untuk mengolah pakan-pakan ini bisa menumbuhkan ekonomi yang bagus buat mereka dan kualitas-kualitas yang lebih baik lah.

Jadi kami minta seperti itu supaya ada dengan Dirjen yang lain mungkin menghadirkan regulasi yang sudah mahir untuk ditemukan dengan regulasi yang dalam bimbingan kita ini, supaya dia ketemu *gitu*. *Nah* apa sih sinkronisasinya yang bisa mereka tambahkan dan mungkin bisa CSR perusahaan-perusahaan ini dibantukan juga sebagian sebagai teknologi dan pengembangan lain *gitu* di dalam regulasi itu *gitu*.

Menurut saya itu penting Pak Menteri karena kalau *nggak* anggaran yang kita gunakan ini kan nanti kalau tidak ada bimbingan menurut saya kualitas yang dihasilkan tidak akan tercapai seperti yang kita inginkan *gitu*. Mungkin itu yang dari sisi regulasi.

Dan kemarin juga ada program yang melakukan pendidikan buat masyarakat, *nah* ini saya belum bisa jawab Pak Menteri karena setelah dilakukan pelatihan ini kan penyampaiannya manis dengan masyarakat, bahwa setelah nanti dilakukan pelatihan yang masyarakat dilatih ini bisa langsung diterima untuk dikerjakan di perusahaan-perusahaan yang akan direkomendasikan oleh kementerian.



Nah sampai hari ini saya tiap hari ditelepon, ini belum kerja-kerja Pak, sertifikatnya sudah diterima, tapi masyarakatnya belum ditempatkan di mana harus bekerja *gitu*. Jadi ini komitmen ini yang kami nanti jangan menjadi bola panas buat kami sendiri *gitu*. *Nah* tolong supaya ada kepastian Pak Menteri, ini Pak apa ini yang nomor dua dari samping, *nah* programnya Pak itu karena kemarin 100 jadinya 30, saya juga *nggak* ngerti *nih* sebenarnya.

Jadi cuman saya ditagih terus nih setiap hari, *nah* ada juga yang sudah berhasil. Kami berharap bimbingannya sama *dong* seperti itu, supaya kebijakan dan kami minta kemarin dari yang berhasil itu untuk membimbing anggaran yang berikutnya itu mereka ikut membimbing supaya keberhasilan itu bisa mencapai seperti yang kita lihat itu, *nah* mungkin disinkronkan Pak transfer teknologinya itu bisa nyambung *gitu* supaya masyarakat ini setelah mendapat sertifikat itu ada kepastian legalitas mereka bahwa mereka profesional dari yang sertifikat yang diberikan oleh kementerian tadi.

Nah itu yang tidak dikawal menurut saya, jadi bolanya ngambang dan itu balik mempertanyakan ke kita, harus ada siapa dibawah Pak Dirjen yang bisa memberikan kepastian itu *gitu*. *Nah* itu ada di Sumatera Barat juga ada kerajinan pembuatan kue apa *gitu*, itu udah berhasil. *Nah* itu kita minta ditransfer ke Riau *gitu*, *nah* itu sekarang lagi berjalan untuk di anggaran berikutnya. Tapi ini minta pengawalannya lebih kuat Pak, supaya jangan sampai nanti itu menjadi pertanyaan lagi buat masyarakat kepada kami *gitu*, nanti kita melakukan pendidikan 500, bukan 500 yang dapat, pening yang ada jadinya *gitu*. Jadi balik nanya ke kita *kan* repot *gitu*.

Nah itu mungkin yang dari anggaran regulasi, yang lain-lain mungkin kami minta nanti pada dirjen yang juga membawahi seluruh perusahaan industri. *Nah* kalau bisa di kesempatan 2023 ini ada lah pertemuan-pertemuan dengan seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di daerah dan dapil-dapil kami, supaya ini ada manfaatnya juga buat kami semua.

Teman-teman yang mungkin perusahaannya di kawasan-kawasan industri, *nah* ini ada pertemuan Pak Dirjen yang mungkin mempertemukan bagaimana *sih* regulasi pencakupan tenaga kerja yang ada di kawasan mereka, *nah* itu yang mungkin belum sinkron dengan masyarakat-masyarakat yang ada di dapil maupun di daerah-daerah teman-teman yang di Komisi VII.

Itu mungkin penegasan dari Pak Dirjen Pak, mungkin kita minta waktu ya seperti ya kayak FGD lah atau apa lah di daerah yang bisa masa reses bisa kami pergunkan untuk menggabungkan perusahaan-perusahaan industri tadi *gitu*. Padahal banyak lahannya yang juga bodong tapi sinkronisasinya *nggak* jalan *gitu*, itu *kan* bisa menjadi masalah yang menjadi keruh ya menurut saya.

Terus yang berikutnya saya kemarin minta melalui Rapat Pimpinan masalah regulasi Imei itu Pak Menteri. Kita ada dikasih laporan tentang regulasi transaksi Imei tadi yang dilakukan oleh Kementerian Menperin dan di sini ada beberapa datanya Pak, regulasi tentang transaksi penerbitan Imei tadi.

Nah, menurut kami ada rapat tersendiri nanti untuk melakukan pendalaman Pak Menteri, jadi di sini ada nomor seri, ada komunikasi yang dikirimkan ke saya, *nah* ini juga ada di beberapa instansi hukum yang sudah dilakukan untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan mungkin.

Nah, saya minta kepada Pak Dirjen, Pak Menteri untuk menjelaskan regulasi ini sejelas-jelasnya, supaya saya lihat direktornya juga udah dipindah ini yang mau kita tanyain. Jadi sedikit mungkin saya sampaikan di sini, ada nomor yang sudah yang dimohonkan tapi itu dimiliki oleh iPhone 7, padahal iPhone 7 itu kan 2016-2017 terbitnya, *nah* tapi diajukan sekarang *gitu*, *nah* itu nomornya terbit lagi.

Nah itu yang menjadi regulasi yang menjadi pertanyaan kita dan setiap minggu regulasi ini terbit sebesar 15.000 nomor, *nah* jadi ini yang mungkin kami minta penjelasan nanti Pak Menteri, supaya ya jelas lah seperti apa regulasi ini dan di sini juga kata-kata sandi yang di dalam regulasi, regulasi penerbitan menurut kami nomor-nomor bodong *lah*, tapi nomor ini sekarang bertransaksi di luar.

Nah, mungkin meminta kepada Pimpinan rapat khusus dengan Pak Dirjen tentang regulasi yang dilakukan tentang Imei ini dan sekali lagi kami minta kepada Pak Menteri supaya tadi program-program kita ini butuh bimbingan dan penguatan aja Pak Menteri, supaya program anggaran yang kita lakukan maupun regulasi wewenang yang diberikan negara kepada kementerian ini bisa bermanfaat buat Komisi VII dan jangan bermanfaat buat perusahaannya saja dan komunikasi dirjen dengan perusahaan-perusahaan itu, tapi bagaimana kami juga yang ada di daerah dan melihat regulasi perusahaan ini yang menurut kami tidak wajar melakukan komunikasi kepada masyarakat. Mungkin wewenang dan tanggung jawab yang ada di kementerian ini bisa membantu memberikan kesejahteraan buat masyarakat, mungkin itu Pak.

Jadi di dalam waktu reses nanti kami minta kepada Pak Dirjen dapat mendampingi kami untuk bertemu dengan perusahaan-perusahaan dan berkomunikasi tentang bagaimana sistem yang bisa diberikan kepada masyarakat memberikan keringanan, tapi tidak meminta Pak Menteri tapi memberikan ilmu untuk penambahan teknologi mereka.

Nah seperti tadi pembuatan pakan ternak, *nah* kita sekarang sudah bangun mesinnya, mungkin regulasinya mungkin supaya kandungan pakan ternak tadi bisa berkualitas, mungkin ada beberapa hal yang mungkin namanya *nggak* tahu vitaminnya apa *gitu*. *Nah* mungkin itu perlu diberikan dorongan dari perusahaan, supaya kalau pakan ini dijual dengan perusahaan-perusahaan besar *monggo*, tapi kalau perusahaan-pesanan yang kecil, masyarakat ekonomi kecil yang membangun mesin ini mungkin bisa dapat keringanan yang sangat baik, kalau teknologi yang kita berikan ini bisa dibina Pak *gitu*.

Mungkin di kesempatan pertama nanti yang diberikan bantuan oleh Pak Menteri, saya berharap kita ada membangun perbengkelan. *Nah* mungkin 3-4 bulan selesai Pak Menteri, kalau bisa nanti Pak Menteri yang meresmikan



tempat itu *nah gitu*. Jadi lokasinya hampir 1 hektar kita bangun, *nah* sekalian ada bangunan gedung *showroom*-nya, kita membangun bengkel restorasi mobil-mobil tua. *Nah* mungkin nanti itu bisa Pak Menteri hadirin di Pematangsiantar, mungkin itu.

Itu aja Pak Menteri, karena bukan di dapil tapi di tempat kelahiran, supaya, ya kalau bisa, kalau *nggak* bisa nanti Pimpinan yang hadir. Mungkin itu Pak Menteri, yang bisa saya sampaikan dan, ya teman-teman lah, itu memanfaatkan semua SMK Pak, SMK nanti yang terus dilatih di sana dan kita melihat dari Jawa Tengah.

Nah di Jawa Tengah itu pembangunan bengkel ketok mobilnya itu dibangun di sekolah SMK, *nah* jadi kalau yang tua ini bakal mati, anak-anak ini bisa tumbuh dan menjadi orang-orang yang berkembang *gitu*, mungkin itu. Jadi saya komunikasikan dengan teman-teman perbengkelan *tuh* dengan Semarang supaya komunikasinya terbangun, tapi peralatannya udah bagus-bagus.

Mungkin itu Pak Menteri, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi lillahi ta'ala wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam, terima kasih.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Nampaknya Pak Nasir *nih* abis shalat Shubuh, tadi malam 5 waktunya tak lepas.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Bukan, ini karena seminggu ini banyak komunikasi dengan Pak Maman. Jadi kalau rapat sama Pak Menteri agak *soft sikit Bang* katanya...*oke oke*...ku bilang, kalau *nggak*, bisa kita suruh keluar Pak Menteri, nanti bahaya, Pak Maman pun pening.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Nasir dari Demokrat.

Dilanjut dari PKS, Bu Diah silakan.

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,



Pimpinan dan teman-teman Komisi VII yang saya hormati,
Pak Menteri beserta seluruh jajarannya.

Nggak banyak Pak, tadi sebagian besar sudah disampaikan juga oleh teman-teman bagaimana langkah-langkah yang sudah dilakukan dengan melahirkan wirausaha baru ini bisa berlanjut *gitu* ya dengan, dengan penguatan juga tadi, seperti peralatan yang bisa mendorong mereka dan kemudahan-kemudahan lainnya, sehingga betul-betul lahir wirausaha-wirausaha baru itu, apa *nggak*, *nggak* setengah-setengah *gitu* dari sisi prosesnya.

Yang saya ingin tanyakan ini pertama tentang restrukturisasi mesin dan peralatan industri tekstil Pak ya, kalau boleh saya mendapatkan penjelasan untuk riil konkretnya seperti apa dan perusahaan ini di mana Pak yang mendapatkan bantuan dari Kementerian.

Di daerah saya Pak Menteri juga pasti tahu itu adalah juga daerah yang sangat kuat basis industri tekstilnya dan mengalami keterpurukan yang luar biasa juga pada saat pandemi itu. Oleh sebab itu saya juga ingin tahu dari 16 perusahaan ini berada di mana saja.

Yang kedua Pak, memang tidak ada di dalam paparan Pak Menteri tetapi ini memang satu pertanyaan yang besar, banyak diajukan oleh teman-teman Pak. Kita sudah mengembangkan pesawat N219 kerjasama PT Dirgantara Indonesia dengan LAPAN pada saat itu, yang kemudian sudah sampai dengan *first flight* ya dan yang namanya pesawat itu untuk bisa kemudian nanti diproduksi tentu tidak cukup kita menghasilkan satu pesawat.

Kemarin anggarannya banyak dibantu dengan kerjasama BRIN dengan PT DI karena masih dalam bentuk riset dan lain-lain. Kalau kemudian pesawat itu nanti mau beroperasi pasti harus melalui proses sertifikasi dan ketika sertifikasi ini harus dimiliki minimal itu ada 4 prototipe pesawat dengan persis sama.

Nah untuk memproduksi pesawat kedua, ketiga, keempat BRIN ini sudah lepas tangan karena sudah bukan lagi menjadi bagian dari penelitian. Kalau memang kita serius akan memproduksi pesawat tersebut yang katanya juga sudah menjadi kebanggaan bangsa kita bisa bikin pesawat lagi setelah dulu N250 gagal, sekarang dicoba N219 dan itu juga sangat akan sangat bermanfaat sesungguhnya untuk negara kita pesawat N219 itu.

Tapi sesudah *euphoria* dengan dia sudah *first flight* sekarang ngegantung lagi karena tidak ada *support* kemudian untuk pengembangan melahirkan prototipe pesawat kedua, ketiga, keempat agar bisa dilakukan sertifikasi agar bisa kemudian berikutnya bisa memproduksi *gitu* ya.

Kalau kita dengar sekarang *oh* sudah ada yang mau beli dan lain-lain itu masih perjalanan yang sangat panjang, boro-boro mau jual *gitu* ya, sekarang untuk sertifikasi saja tidak ada itu pengembangan produksi untuk pesawat yang kedua, ketiga, keempatnya misalnya. *Nah* BRIN lepas tangan lalu siapa yang

harus bertanggung jawab, *oh* berarti PT Dirgantara Indonesia, ya PT Dirgantara Indonesia ini kan mungkin kalau sendirian dia juga masih belum bisa.

Nah ini butuh *support* saya pikir dari pemerintah *gitu* keseriusan kalau memang kita ingin memproduksi pesawat terbang dan menurut saya N219 itu sangat apa ya sangat logis *lah*, sebuah keniscayaan buat kita itu Indonesia dengan negara kepulauan punya bisa memproduksi pesawat sendiri yang kapasitasnya memang akan sangat dibutuhkan untuk berada di apa namanya, ke pedalaman *gitu* seperti itu baik untuk penumpang maupun kargo.

Yang masih lanjut dengan BRIN sekarang adalah penelitian ketika pesawat itu dimodifikasi menjadi pesawat *amfibi* agar bisa *take off landing* di air *gitu* ya, itu mungkin masih riset. Tapi tadi diproduksi untuk bisa dia agar menjadi sertifikasi ini sekarang jadi tanggung jawab siapa, jadi terkatung-katung, oleh BRIN dilepas *nah* lalu dia mendapatkan *support* sistemnya dari mana, mungkin Pak Menteri bisa memberikan penjelasan lebih lanjut.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Bu Diah.

Selanjutnya dari Fraksi PAN tadi udah mengundurkan, pas. Fraksi PPP tidak hadir, saya pikir cukup ya. *Oh* Pak Gandung, silakan Pak Gandung.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Terima kasih.

Saya kepada Pimpinan aja, jadi saya agak merasa gelisah ini Pak Menteri tentang harga gas bumi tertentu. Ternyata masih ada masalah di sini yang yang saya pikir besok kita undang dengan agenda ini Pak, bagaimana ada yang sudah masuk memang tapi malah sampai saat belum mendapat HGBT ini.

Ada yang dikurangi sampai berapa puluh persen, ini tidak konsisten dengan kita memakai produk dalam negeri, pupuk mahal dan sebagainya. Itu saya kepada Pimpinan, ini di agendakan, kita panggil, kita cari pokok masalahnya, sehingga bisa apa, masalah yang timbul di Kementerian Perindustrian ini bisa teratasi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Gandung.

Saya pikir cukup ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya persilakan Pak Menteri ini pas setengah 4. Jadi Pak Menteri silakan menjawab yang poin-poin



utamanya, sisanya boleh dijawab secara tertulis kepada kami nanti. Poin-poin utama dijawab di sini kemudian sisanya boleh dijawab dengan tertulis nanti Pak.

Silakan, silakan Pak Menteri.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Izin Pimpinan, bagus Pak Menteri jawabnya tertulis saja nanti dirjennya saja kita lakukan pendalaman lagi, biar Pak Maman senang Pak Menteri, kita ini ikut kata Pak Maman dulu supaya nanti pendalamannya sama dirjen saja Pak Menteri, karena kan yang teknis di Pak Dirjen-Pak Dirjen ini Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Nggak ini Nasir buru-buru mau sholat ashar soalnya.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Bukan kita jam 4 ada rapat.

KETUA RAPAT:

Ini *gue nggak tau*, Nasir salah makan obat *atau apa gue nggak tau* hari ini.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Ini karena Pak Dony sama Pak Maman, kalau tadi Pak Sugeng beda lagi, saya di suruh aja.

KETUA RAPAT:

Oke, silakan Pak Menteri. Silakan Pak Menteri.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI (Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA, M.Sc.):

Terima kasih Pimpinan dan segenap Anggota Komisi VII yang benar-benar saya hormati.



Pertama yang ingin saya sampaikan *automatic adjustment* tidak akan ada pengaruhnya terhadap program kita semua di dapil, itu bisa kami sampaikan.

Yang kedua, saya terima kasih kepada Pak Nasir jadi menterinya agak bebannya agak lebih ringan karena boleh menjawab tertulis Pak dan silakan diundang dirjen-dirjennya silakan Pak. Pak Nasir juga bisa langsung hubungi saya Pak, kalau ada hal-hal yang bisa diselesaikan.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Pak Menteri, ini juga kejutan tadi mau keras *kok* jadi lunak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Pak Maman soalnya sudah *wa* tadi, *slow, oke*.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI (Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA, M.Sc.):

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai cukai, saya sangat setuju ya dengan keberatan cukai yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang, kalau tidak salah ya dan ini bisa juga disampaikan bahwa bukan hanya cukai yang berkaitan dengan plastik dan itu plastik sekarang kita sedang mendorong upaya *reprocessing* plastik ini sudah bukan lagi menjadi monster, plastik ini menjadi bahan yang ada nilainya sebagai bahan baku sebagai sirkulasi ekonomi dan juga cukai untuk bahan pemanis ini juga menjadi perhatian kita karena itu menjadi apa namanya masukan dari berbagai macam industri.

Memang pemerintah menerapkan kebijakan cukai dan pemanis itu untuk mengurangi obesitas, untuk lebih hidup sehat, tapi mungkin apa namanya bisa kita lihat opsi yang lain. Jadi kalau untuk cukai kami sangat setuju untuk HGBT, Pimpinan kami punya data lengkap terhadap perusahaan-perusahaan yang masuk dalam 3 kluster yang tadi kami sampaikan, datanya sudah lengkap nanti disampaikan oleh KPII atau oleh IKFT, sehingga Komisi VII bisa mengetahui secara jelas.

Untuk program-program seperti tadi yang saya sampaikan, program dapil tidak terdampak dari *automatic adjustment* dan sudah bisa dimulai, baik itu melalui BPSDMI, melalui IKMA ya sudah bisa dimulai, silahkan jalan supaya bisa lebih cepat dan karena sebenarnya bagi kami juga penyerapannya lebih cepat, kita akan lebih baik bagi pertanggungjawaban kami.

Ini saya harus menjawab ya, saya harus menjawab mengenai IMEI. IMEI menjadi perhatian penting, yang menurut kami regulasi tidak ada masalah, regulasi tidak ada masalah. Kalau memang ada ada penyimpangan dalam di



lapangan itu, itu harus saya sampaikan ke oknum dan saya sebagai menteri sudah mengetahui.

Bahkan kami, saya sudah melakukan beberapa rapat secara internal dan ini sudah ditangani oleh pihak yang berwenang untuk menangani. Jadi kami sangat mendukung itu mengenai IMEI, jadi kami tidak diam, kami melakukan pembinaan dan pembenahan di dalam Pak Nasir.

Kalau untuk N219 Ibu Diah, saya kira apa namanya Kemenperin justru waktu itu sejak awal kami yang menginisiatif menginisiasikan program N219 dan saya, kami baru mendengar tadi yang disampaikan oleh Ibu Diah dan akan menjadi perhatian kami ya. Kami akan mengkoordinir kementerian dan lembaga lain karena pasti mengenai sertifikasi bukan di kami, itu ada di Kemenhub dan pasti Kemenhub juga akan melihat bagaimana regulasi yang ada di FAA, atau yang ada di Europe atau lain sebagainya.

Jadi kalau kita bicara soal keselamatan dan keamanan, memang kita harus, harus tegas tapi intinya kami akan koordinir Bu. Kami akan koordinir karena ini program yang justru waktu itu, waktu dulu itu kami yang inisiasi, di kementerian kami yang inisiasi. Jadi terima kasih atas info yang disampaikan oleh Ibu Diah.

Saya kira itu Pimpinan yang kami hormati, Anggota Komisi VII yang kami hormati. Selanjutnya beberapa pertanyaan yang belum sempat kami jawab akan kami jawab secara tertulis. Sekali lagi terima kasih atas undangannya, terima kasih atas dukungannya dari Komisi VII kepada kami di Kemenperin dan selanjutnya kami mohon arahan.

KETUA RAPAT:

Ya, terima kasih Pak Menteri.

Demikianlah jawaban dan penjelasan dari yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri Perindustrian Republik Indonesia, apabila sudah cukup dan tidak ada hal lain yang perlu disampaikan mari kita lanjut ke kesimpulan, silakan ditayangkan kesimpulannya.

Draf kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Selasa 14 Februari 2023.

1. Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi kepada Menteri Perindustrian Republik Indonesia terkait capaian realisasi anggaran tahun 2022 serta dampak positif dan berbagai program prioritas Kementerian Perindustrian yang merupakan penopang utama perekonomian nasional.

Setuju?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**



2. Komisi VII DPR RI mendukung penerapan Bullion Bank dalam mendorong industri perhiasan agar lebih efektif dan meningkatkan nilai tambah, serta penyerapan tenaga kerja industri perhiasan.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI (Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA, M.Sc.):

Kalau boleh Pimpinan, dalam mendukung hilirisasi dari, mas gimana itu cara merangkainya, jadi kita tidak khusus untuk masuk pada industri perhiasan tapi hilirisasi dari emasnya, *which is* sebetulnya sebagian besar di perhiasan.

Jadi maksud saya jangan di lokalisir kepada hanya perhiasan. Tapi Bullion Banknya memang kami butuh dukungan Pak Pimpinan, cuman tinggal narasinya aja supaya jangan dikhususkan perhiasan tapi hilirisasi emas.

KETUA RAPAT:

Bullion Bank dalam mendorong hilirisasi emas agar lebih efektif, hilirisasi emas *gitu* Pak.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI (Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA, M.Sc.):

Industri perhiasannya boleh dihapus Pak.

KETUA RAPAT:

Oh perhiasannya dihapus, dalam mendorong nilai tambah, tenaga kerja saja industri hilang, itu ya, gini ya?

Oke, Komisi VII DPR RI mendukung penerapan Bullion Bank dalam mendorong hilirisasi emas agar lebih efektif dan meningkatkan nilai tambah, serta penyerapan tenaga kerja. Setuju?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

3. Komisi VII DPR RI mendukung usulan pemanfaatan DHE untuk mendorong pengembangan sektor industri di Indonesia.

Setuju?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**



4. Komisi VII DPR RI mendukung kepastian alokasi pasokan gas HGBT di seluruh Indonesia guna memenuhi kebutuhan pengembangan industri.

Oke?

(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)

5. Komisi VII DPR RI mendorong Menteri Perindustrian Republik Indonesia untuk memprioritaskan proyek industri mineral yang dapat memberikan nilai tambah paling tinggi.

Oke?

(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)

F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Pimpinan, tambahan Pimpinan.

Saya pikir sebelum kita masuk kepada poin ke enam, saya pikir kita juga perlu memberikan atensi terhadap beberapa hal seperti yang dijawab langsung oleh Pak Menteri, terkait dengan persoalan regulasi di bidang fiskal kah, yang dipikir mungkin tidak, tidak terlalu mendukung pengembangan sektor industri, seperti misalkan cukai plastik tadi ya kan. Saya pikir ini perlu kita atensi Pimpinan, di mana kita apa namanya apa *tuh*, tentang beberapa regulasi fiskal yang dianggap memberatkan kita minta untuk dipertimbangkan.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI (Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA, M.Sc.):

Kalau boleh saya usul tapi saya mohon izin untuk mematikan *mic* karena saya bagian dari pemerintah.

KETUA RAPAT:

Coba saya baca dulu ya.

6. Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah melalui Menteri Perindustrian Republik Indonesia untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah untuk pemberlakuan Cukai, misalnya pada plastik dan bahan pemanis.



Cukup? Cocok ya, *oke*.

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):

Pimpinan, tambahan sebelum terakhir.

Saya mengusulkan tadi terkait dengan pengembangan N219 itu juga dijadikan satu kesimpulan rapat. Bahwa Komisi VII meminta Menteri Perindustrian Republik Indonesia untuk menindaklanjuti pengembangan pesawat N219 karena tadi itu terkait dengan, artinya adalah langkah-langkah selanjutnya yang memang harus ditindaklanjuti karena selama ini selalu jadi pingpong, ini kewenangan siapa *gitu*. Jadi BRIN sudah lepas lalu kan PT DInya di bawah Kementerian Perindustrian.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI (Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA, M.Sc.):

Saya setuju prinsipnya Bapak Pimpinan, mungkin bukan menindaklanjuti Pak Pimpinan tapi mengkoordinir, mengkoordinasikan pembuatan, mengkoordinasikan kelanjutan pembuatan pesawat 219 atau 250? N219, mengkoordinasikan kelanjutan pembuatan pesawat N219.

KETUA RAPAT:

Iya cukup, *oke* saya ulang ya.

7. Komisi VII DPR RI meminta Menteri Perindustrian Republik Indonesia untuk mengkoordinasikan kelanjutan pembuatan pesawat N219.

Cukup ya?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

8. Komisi VII DPR RI meminta Menteri Perindustrian Republik Indonesia untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 21 Februari 2023.

Oke?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**



Bapak-Ibu yang kami hormati.

Demikianlah pembahasan dan kesimpulan rapat kerja pada hari ini, sebelum mengakhiri rapat kami persilakan kepada Menteri Perindustrian Republik Indonesia untuk menyampaikan sambutan penutup.

Kami persilakan.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI (Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA, M.Sc.):

Terima kasih, Pimpinan.

Segenap Anggota Komisi VII tidak ada tambahan yang ingin kami sampaikan selain menyampaikan terima kasih dan apresiasi dan *Insyallah* akan kami tindaklanjuti semua yang menjadi kesimpulan dari hasil rapat kita siang sore hari ini.

Terima kasih, Pimpinan.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Perindustrian Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya, atas kerjasamanya yang baik dalam rapat kerja hari ini. Akhirnya dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* rapat kerja ini saya tutup.

Terima kasih.

*Wabillahittaufiq wal hidayah,
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.55 WIB)
(KETOK PALU 3 KALI)**

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Dra. Nanik Herry Murti
NIP. 196505061994032002

